

NADIEM DIMINTA RESPONSIF TANGGAPI TEMUAN OMBUDSMAN

Rabu, 20 November 2019 - Muhamad Fatra Dasa Mura

Jakarta: Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ninik Rahayu mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim agar lebih responsif dalam menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi yang disampaikan Ombudsman RI.

Koordinator Pengampu Bidang Resolusi dan Monitoring ORI itu menyebut, Nadiem kini bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI yang sebelumnya ditujukan untuk Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).

"Ini sebenarnya permintaan ulang, kami mengingatkan Menteri Ristek sejak 2017-2018 lalu yang memperoleh rekomendasi dari Ombudsman, tapi tidak dilaksanakan," kata Ninik, di Jakarta, Rabu, 20 November 2019.

Kebetulan rekomendasi tersebut terkait dengan pendidikan tinggi yang sekarang kembali menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Karena itu, Ninik berharap kepada Nadiem yang berlatar belakang kaum milenial, lebih tanggap, responsif, dan lebih memiliki komitmen dalam rangka memperbaiki kepatuhan institusi untuk mencegah maladministrasi.

Ninik menyebut ada tiga rekomendasi di tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab Menristekdikti saat itu, namun tidak dijalankan sama sekali. "Kalau itu tidak dijalankan, artinya

memberi peluang kepada aksi serupa, karena tidak diselesaikan dengan baik," kata Ninik.

Rekomendasi tersebut di antaranya terkait temuan maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor, strata tiga luar negeri dan jabatan fungsional dosen untuk menjadi guru besar. Temuan maladministrasi penyelesaian penyelenggaraan Universitas Lakidende oleh Kemenristekdikti.

Temuan maladministrasi terkait penanganan dugaan plagiat karya ilmiah oleh Rektor Universitas Halu Oleo, Muhammad Zamrun Firihi. Khusus pada kasus ketiga, kata Ninik, karena tidak segera ditindaklanjuti oleh Kemenristekdikti maka kembali terulang kasus yang sama, kali ini oleh Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Padahal jika Kemenristekdikti saat itu segera membuat aturan bagaimana mekanisme penyelesaian temuan tersebut, maka kejadian yang sama semestinya bisa dihindari.

"Rektor Unnes diduga melakukan plagiarisme karena Kemenristekdikti tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan. Dan ini akhirnya menjadi berulang," tegas Ninik.

Ninik berharap Nadiem sebagai Mendikbud yang baru dapat lebih responsif terhadap temuan Ombudsman sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2008. "Sesuai amanah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa komitmen ini wajib untuk dilaksanakan sebagai bagian penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik," kata Ninik.